PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI DI KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

FAKHRI ALFARIZI

1610113043

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Efren Nova, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Indonesia saat ini di bidang teknologi dan informasi pada era sekarang berada dalam kemajuan yang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi dan salah satunya tindak pidana peredaran barang ilegal.Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusatperdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatra dan merupakan tempat yang cukup strategis bagi para pengedar barang illegal terlebih khusus bagi peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang melanggar Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai.Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Bukittinggi. Dalam Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bukittingi (2) Bagaimana tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Bukittinggi. Dalam Penilitian ini penelitian ini penulis menggunakan metpde penelitian yuridis empiris yaitu teknik pengumpulan data online untuk data sekunder,sifat penelitian yang digunakan bersifar deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai sanksi pidana menurut Undang-Undang 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap pada pengedar rokok ilegal di Kota Bukittinggi. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Penegakan Hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai di kota Bukittinggi berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) dan dikenakan sanksi pidana serta denda berdasarkan 39 Tahun 2007Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Sedangkan tata cara dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bukittinggidilakukan oleh direktorat jendral bea dan cukai sudah sesuai dengan prosedural yang ada.

Kata Kunci: Penegakan, Rokok Ilegal, Bea Cukai.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA